

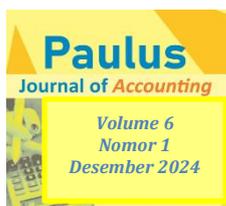
PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN REVIU PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NABIRE

Monika Helena Maniawasi¹⁾, Amir Jaya²⁾, Amson Padolo³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar

Email Korespondensi:

monikahelena_maniawasi@gmail.com



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

20 September 2024

Tanggal revisi

28 Oktober 2024

Tanggal diterima

30 Desember 2024

Kata Kunci:

Peran Inspektorat¹⁾;
Reviu²⁾; Laporan
Keuangan³⁾

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran Inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Nabire. Melalui metode kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah melalui tahapan reviu yang sistematis, termasuk persiapan, pengumpulan data, analisis, dan monitoring tindak lanjut. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan resistensi dari instansi terkait. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antarpihak. Dengan proses reviu yang efektif, pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Abstract: This study analyzes the role of the Inspectorate in reviewing the Regional Government Financial Report (LKPD) in Nabire Regency. Through qualitative methods, data were collected from interviews, observations, and documentation with seven informants. The results of the study indicate that the role of the Inspectorate is very important in ensuring accountability and transparency of regional finances through systematic review stages, including preparation, data collection, analysis, and follow-up monitoring. The main challenges include limited human resources, budget, and resistance from related agencies. To overcome this, capacity building, technology utilization, and collaboration between parties are needed. With an effective review process, regional financial management can be improved, providing greater benefits to the community, and increasing public trust in the regional government. This study provides strategic insights for better regional financial management.



PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Nabire adalah lembaga pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Indonesia. Inspektorat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat bertugas melakukan reviu terhadap laporan keuangan dan kegiatan pemerintahan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas penggunaan anggaran, dan kinerja instansi pemerintah daerah; Inspektorat berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah; Setelah melakukan reviu, Inspektorat memberikan rekomendasi untuk

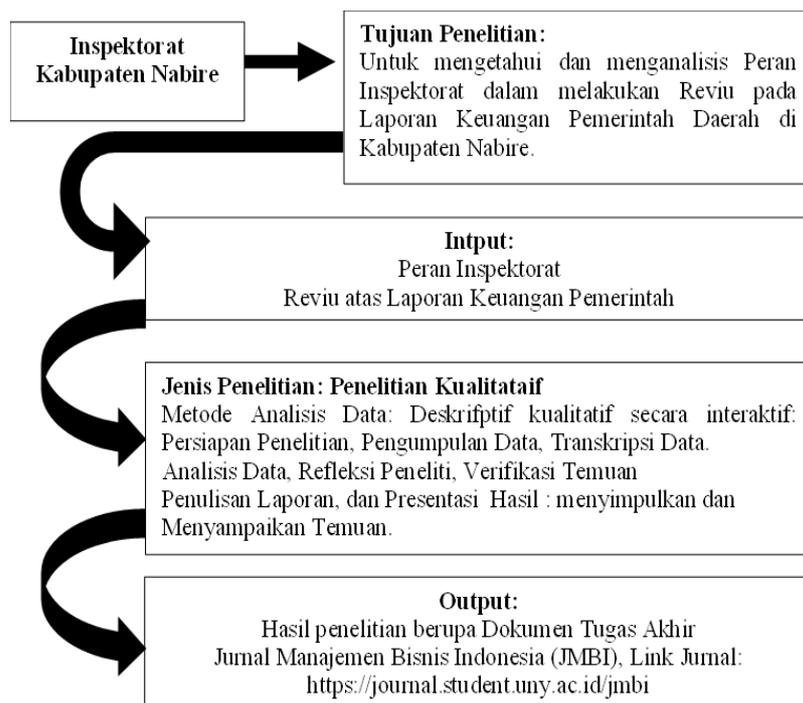
perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi kepada pemerintah daerah; dan Inspektorat juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada pegawai pemerintah tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Lambe et al., 2024). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Pemerintah Indonesia, 2017), Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Pelaporan Hasil Reviu Inspektorat bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil reviu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, agar mereka mengetahui kondisi keuangan dan pengelolaan anggaran daerah. Peran inspektorat dalam pemerintahan daerah sangat krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui fungsi pengawasan, Reviu, dan pemberian rekomendasi, inspektorat membantu memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan efektif, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akruwal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 nomor 15 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal, 2018) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Reviu LKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Komponen LKPD yang direviu sesuai pasal 11 ayat (4) poin (a) sampai (g), adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan konsolidasi dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan tiap-tiap instansi dalam Pemerintah Daerah.

Adapun Tujuan Reviu adalah Reviu LKPD sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal, 2018), bertujuan agar APIP dapat memberi keyakinan terbatas mengenai laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan SPI yang memadai serta telah disajikan sesuai dengan SAP. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan audit karena dalam pelaksanaan reviu, pereviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. Pereviu hanya dapat mengarahkan perhatian kepada hal-hal penting yang memengaruhi laporan keuangan namun tidak dapat memberikan suatu keyakinan mutlak berupa opini atas suatu LKPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Proses Reviu pada Reviu LKPD merupakan kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Menurut pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal, 2018) tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal, tahap kedua yang dilakukan oleh pereviu adalah tahap pelaksanaan. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, tahap terakhir dalam melakukan reviu adalah tahap pelaporan.

Penelitian ini menetapkan obyek penelitian di Inspektorat Kabupaten Nabire, dengan fokus penelitian pada Peran Inspektorat, Reviu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat diharapkan dapat memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan adanya reviu, diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan, penyimpangan, dan fraud dalam laporan keuangan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan pengamatan peneliti pada obyek penelitian ini yakni di Inspektorat Kabupaten Nabire, terkait Peran Inspektorat, Reviu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, peneliti mengidentifikasi beberapa kejadian yang dijadikan sebagai fenomena dalam penelitian ini, fenomena yang dijumpai di obyek penelitian ini sebagai berikut: Inspektorat Kabupaten Nabire dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang dapat memengaruhi kapasitasnya dalam melakukan reviu secara menyeluruh. Hal ini dapat berdampak pada kualitas reviu yang dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama dengan adanya beragam kegiatan dan program yang harus dilaporkan. Hal ini dapat menyulitkan Inspektorat dalam melakukan reviu yang mendalam. Tingkat Kepatuhan yang Beragam dimana tidak semua instansi pemerintah daerah patuh terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fenomena ini menciptakan tantangan bagi Inspektorat dalam memastikan bahwa semua laporan keuangan memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan memahami latar belakang dan fenomena ini, diharapkan penelitian mengenai peran Inspektorat dalam melakukan reviu pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih baik. Sesuai dengan latar belakang dan fenomena yang digambarkan diatas, menjadikan suatu alasan dan memberikan landasan yang kuat untuk melakukan penelitian mengenai peran Inspektorat dalam Reviu laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai proses Reviu, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik di pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peran Inspektorat dalam melakukan Reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire; untuk mengetahui dan menganalisis Proses Reviu di Inspektorat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire; dan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh inspektorat dalam menjalankan proses Reviu di Kabupaten Nabire.

(Arikunto, 2018) menyatakan, alur pikir penelitian adalah proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melaksanakan studi tersebut. Alur Pikir Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara Peran Inspektorat dalam melakukan Reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire. Selanjutnya peneliti menyusun Kerangka pemikiran penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
Sumber: Konsepsi Pribadi Penulis, 2024

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait Peran Inspektorat dalam melakukan Reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire. Lokasi penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire Jl. Poros Samabusa Lagari, Nabire-Papua Tengah. Sumber data pada penelitian ini sebagai berikut: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: Observasi, Wawancara terhadap informan dan Dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang pegawai, dimana informan ini ditetapkan sebab mengetahui tentang Reviu dan Laporan Keuangan. Analisis data dilakukan berdasarkan pendapat Huberman dan Miles (Emzir, 2012), dengan cara analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu dengan cara interaktif. Berikut adalah langkah-langkah analisis interaktif dalam penelitian kualitatif: Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Transkripsi Data, Analisis Data, Refleksi Peneliti, Verifikasi Temuan, Penulisan Laporan, dan Presentasi Hasil dimana menyimpulkan dan Menyampaikan Temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek penelitian di Inspektorat Kabupaten Nabire, dengan fokus penelitian pada Peran Inspektorat, Reviu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan topik akuntansi sektor publik. Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan reviu terhadap keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pengamatan peneliti pada obyek penelitian ini yakni di Inspektorat Kabupaten Nabire, terkait Peran Inspektorat, Reviu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah peneliti mengidentifikasi beberapa kejadian yang dijadikan sebagai fenomena dalam penelitian ini, fenomena yang dijumpai di obyek penelitian ini sebagai

berikut: Inspektorat Kabupaten Nabire dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang dapat memengaruhi kapasitasnya dalam melakukan reviu secara menyeluruh. Hal ini dapat berdampak pada kualitas reviu yang dilakukan; Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama dengan adanya beragam kegiatan dan program yang harus dilaporkan. Hal ini dapat menyulitkan Inspektorat dalam melakukan reviu yang mendalam; dan Tingkat Kepatuhan yang Beragam dimana tidak semua instansi pemerintah daerah patuh terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fenomena ini menciptakan tantangan bagi Inspektorat dalam memastikan bahwa semua laporan keuangan memenuhi standar yang ditetapkan.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Dengan pertanyaan terbuka, peneliti dapat memahami pandangan, pengalaman, dan perasaan informan secara lebih detail. Wawancara merupakan alat yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dengan kemampuannya untuk menggali informasi yang mendalam, fleksibilitas dalam pertanyaan, dan potensi untuk membangun hubungan yang kuat dengan informan, wawancara memainkan peran penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan relevan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian ini, Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang pegawai di Inspektorat Kabupaten Nabire.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap informan 1, mengatakan bahwa:

“Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Mereka menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku serta memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Persiapan Reviu dengan Penentuan Tim Reviu: Inspektorat membentuk tim yang terdiri dari auditor yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Pemahaman Laporan Keuangan dimana Tim reviu melakukan pemahaman awal terhadap laporan keuangan yang akan direviu, termasuk dokumen pendukung lainnya seperti anggaran dan laporan tahunan. Inspektorat sering kali menghadapi tantangan dalam hal jumlah dan kualifikasi auditor yang tersedia. Keterbatasan jumlah auditor yang berkompeten dapat menghambat kemampuan Inspektorat untuk melakukan reviu secara menyeluruh dan mendalam. Supaya melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi auditor dan staf Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang akuntansi, auditing, dan regulasi keuangan. Ini penting agar Inspektorat dapat melakukan reviu dengan lebih efektif dan profesional. Hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat disampaikan kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui laporan resmi. Laporan ini berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang jelas, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas maka dapat di ketahui bahwa Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui proses reviu, Inspektorat menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pembentukan tim reviu yang terdiri dari auditor berkompeten dan berpengalaman merupakan langkah awal yang krusial untuk mencapai tujuan ini. Tim reviu melakukan pemahaman awal terhadap laporan keuangan, termasuk dokumen pendukung lainnya, guna memastikan bahwa proses reviu dilakukan secara menyeluruh. Inspektorat menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah dan kualifikasi auditor yang tersedia, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan reviu yang mendalam dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk melaksanakan

pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi auditor dan staf, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang akuntansi, auditing, dan regulasi keuangan. Hasil revidu yang dilakukan oleh Inspektorat disampaikan kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui laporan resmi yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang jelas. Laporan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah (Hidayati & Ali, 2023). Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan 2 yang mengatakan bahwa:

“Inspektorat berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan. Melalui pelatihan dan sosialisasi, Inspektorat membantu pegawai pemerintah memahami pentingnya laporan keuangan yang baik dan benar. Revidu dilakukan dengan Pengumpulan Data dan Informasi yang meliputi Instansi pemerintah daerah yang bersangkutan diminta untuk menyerahkan laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya dan Tim revidu dapat melakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang disusun. Anggaran yang terbatas untuk kegiatan pengawasan dan revidu laporan keuangan dapat membatasi kemampuan Inspektorat untuk melakukan audit yang komprehensif, termasuk pelatihan bagi staf dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan. Disarankan agar Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan dan revidu. Dengan anggaran yang cukup, Inspektorat dapat melakukan audit yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan teknologi dan alat bantu yang modern. Setelah laporan revidu disampaikan, biasanya diadakan diskusi antara Inspektorat dan pihak terkait, seperti pengelola keuangan daerah, untuk membahas temuan dan rekomendasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan”.

Berdasarkan informasi dari informan diatas dapat di deskripsikan bahwa Inspektorat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan (Tuidano et al., 2017). Melalui pelatihan dan sosialisasi, Inspektorat berkontribusi dalam membekali pegawai pemerintah dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya laporan keuangan yang akurat dan transparan. Proses revidu yang dilakukan mencakup pengumpulan data dan informasi, di mana instansi pemerintah daerah diminta untuk menyerahkan laporan keuangan serta dokumen terkait lainnya. Tim revidu juga melakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan. Tantangan yang dihadapi Inspektorat, seperti anggaran yang terbatas untuk kegiatan pengawasan dan revidu, dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan audit yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan ini. Dengan anggaran yang cukup, Inspektorat dapat meningkatkan kualitas audit, termasuk penggunaan teknologi dan alat bantu modern yang dapat mempercepat dan mempermudah proses revidu. Setelah laporan revidu disampaikan, diadakan diskusi antara Inspektorat dan pihak terkait, seperti pengelola keuangan daerah, untuk membahas temuan dan rekomendasi. Proses diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami permasalahan yang ada dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik .

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan 3, mengatakan bahwa:

“Inspektorat bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil reviu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan DPRD. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Reviu dilakukan dengan Pemeriksaan dan Analisis yakni Verifikasi Data dimana Inspektorat melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan dan melakukan Analisis Kesesuaian yakni Laporan keuangan dianalisis untuk menilai kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, Inspektorat menghadapi tantangan terkait ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan reviu. Ketidaklengkapan atau ketidakteraturan data dapat menghambat proses evaluasi dan analisis laporan keuangan. Diusulkan Menerapkan sistem informasi manajemen yang lebih baik untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Teknologi ini dapat membantu dalam mengelola data laporan keuangan secara efisien dan meningkatkan transparansi. Hasil reviu Inspektorat sering kali menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya data dan analisis yang objektif dari Inspektorat, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informed dan tepat”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat memegang peranan penting dalam menyusun laporan hasil reviu yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah dan DPRD. Laporan ini tidak hanya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi acuan untuk tindakan perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses reviu melibatkan pemeriksaan dan analisis yang mendalam, di mana Inspektorat melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan, serta melakukan analisis kesesuaian terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat sering menghadapi tantangan terkait ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan reviu. Ketidaklengkapan atau ketidakteraturan data dapat menghambat proses evaluasi dan analisis, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hasil reviu. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan sistem informasi manajemen yang lebih baik dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola data laporan keuangan dan mendorong transparansi. Hasil reviu Inspektorat menjadi salah satu referensi penting dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya data dan analisis yang objektif dari Inspektorat, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informed dan tepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan 4 yang mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan reviu yang objektif dan transparan, Inspektorat berkontribusi pada akuntabilitas publik. Masyarakat dapat lebih percaya pada pengelolaan keuangan daerah ketika ada pengawasan yang ketat dari Inspektorat. Pada Reviu dilakukan Penilaian Temuan yakni Identifikasi Temuan: Tim reviu mengidentifikasi temuan-temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kelemahan dalam laporan keuangan dan Klasifikasi Temuan: Temuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap laporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Terkadang, ada resistensi atau kurangnya kerjasama dari instansi pemerintah daerah yang sedang di-reviu. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman tentang pentingnya reviu atau kekhawatiran mengenai temuan yang mungkin muncul. Agar Membangun hubungan yang lebih baik dengan instansi pemerintah daerah yang sedang di-reviu. Inspektorat dapat melakukan

sosialisasi untuk menjelaskan pentingnya revidi dan bagaimana hasilnya dapat membantu instansi tersebut dalam pengelolaan keuangan. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat diharapkan dapat diimplementasikan oleh instansi terkait. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini menjadi bagian dari rencana aksi perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang sering kali dibahas dalam rapat evaluasi rutin”

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa melalui revidi yang objektif dan transparan, Inspektorat berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya pengawasan yang ketat dari Inspektorat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Proses revidi mencakup penilaian temuan, di mana tim revidi mengidentifikasi dan mengklasifikasikan temuan terkait ketidaksiuaian, penyimpangan, atau kelemahan dalam laporan keuangan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap pengelolaan anggaran. Inspektorat sering menghadapi tantangan berupa resistensi atau kurangnya kerjasama dari instansi pemerintah daerah yang sedang di- revidi. Resistensi ini bisa disebabkan oleh ketidakiahaman tentang pentingnya revidi atau kekhawatiran akan temuan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan instansi tersebut melalui sosialisasi yang menjelaskan pentingnya revidi dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasilnya. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat diharapkan dapat diimplementasikan oleh instansi terkait sebagai bagian dari rencana aksi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini menjadi fokus dalam rapat evaluasi rutin, sehingga setiap temuan dapat ditangani dengan tepat dan berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Hasil wawancara terhadap informan 5 mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan revidi, Inspektorat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai perbaikan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Melakukan Penyusunan Laporan Revidi pada Dokumentasi Hasil, Hasil revidi dan temuan yang didapatkan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang sistematis. Laporan tersebut juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan dapat menjadi tantangan bagi Inspektorat. Inspektorat perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaiknya Menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk proses revidi. Hal ini akan membantu dalam memberikan pedoman yang konsisten bagi auditor dalam melakukan evaluasi laporan keuangan. Inspektorat melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi yang telah diberikan. Hasil monitoring ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah perbaikan yang dilakukan telah efektif dan apakah ada tindak lanjut yang diperlukan”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setelah melakukan revidi, Inspektorat berperan penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait perbaikan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil revidi dan temuan yang diperoleh didokumentasikan dalam laporan sistematis yang mencakup rekomendasi spesifik bagi instansi pemerintah daerah untuk diimplementasikan. Meskipun demikian, Inspektorat menghadapi tantangan berupa perubahan

kebijakan dan regulasi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat untuk terus memperbaiki pengetahuan dan keterampilan mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan standar dan prosedur yang jelas untuk proses revidu juga menjadi langkah yang esensial, yang dapat memberikan pedoman konsisten bagi auditor dalam melakukan evaluasi laporan keuangan. Selanjutnya, Inspektorat melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi yang telah diberikan untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan yang dilaksanakan. Proses monitoring ini penting untuk mengidentifikasi apakah tindak lanjut yang diperlukan sudah dilakukan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi berkontribusi positif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan berkelanjutan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Wawancara terhadap informan 6 mengatakan bahwa:

“Peran Inspektorat dalam melakukan revidu pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire sangat vital. Melalui fungsi pengawasan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi. Tim revidu menyampaikan laporan hasil revidu kepada pimpinan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Inspektorat melakukan Diskusi dan Tindak Lanjut, dihasilkan diskusi mengenai temuan dan rekomendasi, serta langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh instansi terkait. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data dapat menghambat efisiensi proses revidu. Inspektorat perlu memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan dan analisis data. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah Mengembangkan mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa rekomendasi dari laporan revidu diimplementasikan oleh instansi terkait. Evaluasi berkala terhadap tindak lanjut ini dapat membantu memastikan perbaikan berkelanjutan. Melalui integrasi hasil revidu dalam pengambilan keputusan, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan pembelajaran dari temuan revidu untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang”

Informasi dari informan 6 diatas membuat kita dapat mengetahui bahwa peran Inspektorat dalam melakukan revidu pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire sangat vital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Melalui fungsi pengawasan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi, Inspektorat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Tim revidu menyampaikan laporan hasil revidu kepada pimpinan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, di mana hasil ini menjadi dasar untuk diskusi mengenai temuan dan rekomendasi serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan oleh instansi terkait. Namun, keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data dapat menghambat efisiensi proses revidu. Oleh karena itu, Inspektorat perlu memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan dan analisis data, sehingga meningkatkan efektivitas proses revidu. Mengembangkan mekanisme monitoring yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa rekomendasi dari laporan revidu diimplementasikan dengan baik. Evaluasi berkala terhadap tindak lanjut ini akan membantu memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan hasil revidu dalam pengambilan keputusan, diharapkan akan terjadi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan pembelajaran dari temuan revidu untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang. Secara keseluruhan, peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan 7 yang mengatakan bahwa:

“Inspektorat berperan membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada pelaksanaan revidu Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dilaksanakan dengan baik. Tantangan yang dihadapi dilapangan Berbagai tingkat pemahaman tentang akuntansi dan pelaporan keuangan di antara pegawai pemerintah daerah dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan selama proses revidu. Kalau bisa Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, hasil revidu dapat diterima dengan lebih baik dan implementasinya lebih mungkin berhasil”

Sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti pada wawancara dengan informan 7 pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel. Melalui upaya ini, Inspektorat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan revidu, Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dilaksanakan dengan baik. Adapun tantangan di lapangan, seperti berbagai tingkat pemahaman tentang akuntansi dan pelaporan keuangan di antara pegawai pemerintah daerah, dapat menghambat proses pengumpulan informasi yang akurat dan relevan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor kunci untuk keberhasilan implementasi hasil revidu. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, hasil revidu dapat diterima dengan lebih baik, sehingga memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, peran Inspektorat sebagai pengawas dan mitra strategis sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Peran Inspektorat dalam Melakukan Revidu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire

Inspektorat memiliki peran yang krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di Kabupaten Nabire, tugas Inspektorat dalam melakukan revidu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun oleh instansi pemerintah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disampaikan, berikut ini adalah beberapa poin penting yang menggambarkan peran Inspektorat dalam melakukan revidu laporan keuangan.

1. Penyampaian Laporan Hasil Revidu. Inspektorat bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil revidu kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang jelas, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan yang

- sistematis, pihak-pihak terkait dapat memahami secara utuh kondisi keuangan dan potensi permasalahan yang dihadapi.
2. **Diskusi dan Tindak Lanjut.** Setelah laporan revidi disampaikan, Inspektorat mengadakan diskusi dengan pihak terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi. Proses diskusi ini sangat penting karena memungkinkan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hasil revidi. Diskusi ini juga membuka ruang untuk kolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
 3. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data.** Hasil revidi Inspektorat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan data dan analisis yang objektif, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi. Ini meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan meminimalisir risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.
 4. **Implementasi Rekomendasi.** Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat diharapkan dapat diimplementasikan oleh instansi terkait. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini menjadi bagian dari rencana aksi perbaikan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya implementasi rekomendasi, diharapkan terjadi perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
 5. **Monitoring dan Evaluasi.** Inspektorat tidak hanya berhenti pada penyampaian laporan, tetapi juga melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi yang telah diberikan. Hasil monitoring ini digunakan untuk mengevaluasi apakah perbaikan yang dilakukan telah efektif dan jika diperlukan, melakukan tindak lanjut lebih lanjut. Hal ini menegaskan komitmen Inspektorat terhadap perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 6. **Perbaikan Berkelanjutan.** Melalui integrasi hasil revidi dalam pengambilan keputusan, Inspektorat berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan pembelajaran dari temuan revidi untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan adanya siklus ini, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
 7. **Partisipasi Stakeholder.** Keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran Inspektorat. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, hasil revidi dapat diterima dengan lebih baik, dan implementasinya lebih mungkin berhasil. Keterlibatan ini menciptakan atmosfer kerja sama yang positif antara Inspektorat dan instansi pemerintah daerah.

Proses Revidi yang Dilakukan oleh Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nabire

Proses revidi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disampaikan, proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah pembahasan mengenai setiap tahapan dalam proses revidi yang dilakukan oleh Inspektorat.

Tahapan awal dalam proses revidi adalah persiapan. Inspektorat membentuk tim revidi yang terdiri dari auditor berkompeten yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi dan regulasi keuangan. Tim ini melakukan pemahaman awal terhadap laporan keuangan yang akan direvidi, termasuk dokumen pendukung lainnya seperti anggaran dan laporan tahunan.

Persiapan yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa proses reviu dapat dilakukan dengan efektif.

Setelah tahap persiapan, tim reviu mulai mengumpulkan data dan informasi. Instansi pemerintah daerah yang bersangkutan diminta untuk menyerahkan laporan keuangan serta dokumen terkait lainnya. Dalam proses ini, Inspektorat juga dapat melakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang disusun. Pengumpulan data yang komprehensif memungkinkan tim reviu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk analisis.

Setelah data dikumpulkan, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap laporan keuangan. Pada tahap ini, tim reviu melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan laporan. Selain itu, laporan keuangan dianalisis untuk menilai kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan. Proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan.

Setelah analisis dilakukan, tim reviu mengidentifikasi temuan-temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kelemahan dalam laporan keuangan. Temuan ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap laporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Penilaian yang teliti terhadap temuan ini akan membantu dalam merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan.

Hasil dari proses reviu dan temuan yang didapatkan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang sistematis. Laporan ini mencakup deskripsi temuan, analisis yang mendasari, serta rekomendasi untuk perbaikan. Penyusunan laporan yang jelas dan terstruktur sangat penting agar pihak terkait dapat memahami temuan dan langkah-langkah yang perlu diambil.

Setelah laporan reviu selesai, Inspektorat menyampaikan laporan hasil reviu kepada pimpinan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Proses presentasi ini sering kali diikuti dengan diskusi mengenai temuan dan rekomendasi yang ada. Diskusi ini penting untuk menjelaskan hasil reviu dan mendapatkan masukan dari pihak terkait tentang langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Inspektorat melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan. Proses monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan yang Dihadapi oleh Inspektorat dalam Menjalankan Proses Reviu di Kabupaten Nabire

Proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat di Kabupaten Nabire sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, Inspektorat menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses reviu. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disampaikan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Inspektorat adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jumlah auditor yang terbatas dapat menghambat kemampuan Inspektorat untuk melakukan reviu secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya auditor yang berpengalaman dan terlatih dalam bidang akuntansi dan auditing dapat mempengaruhi kualitas hasil reviu. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan beban kerja yang berat bagi auditor yang ada. Inspektorat juga sering kali menghadapi tantangan dalam hal anggaran. Keterbatasan dana untuk kegiatan pengawasan dan reviu dapat membatasi kemampuan Inspektorat untuk melakukan audit yang komprehensif. Tanpa anggaran yang memadai, Inspektorat mungkin tidak dapat mengadakan pelatihan bagi staf, menggunakan

teknologi modern, atau melakukan pemeriksaan lapangan yang lebih mendalam. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas dan cakupan rewiu yang dilakukan.

Ketersediaan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses rewiu sering kali menjadi masalah. Beberapa instansi pemerintah daerah mungkin tidak menyediakan data yang lengkap atau tepat waktu, sehingga menyulitkan Inspektorat dalam melakukan analisis dan evaluasi. Ketidaklengkapan data dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak akurat dan memperburuk hasil rewiu (Lazuardi et al., 2024). Inspektorat juga menghadapi tantangan berupa resistensi atau kurangnya kerjasama dari instansi pemerintah daerah yang sedang direwiu. Beberapa pegawai mungkin merasa terancam oleh proses rewiu dan khawatir terhadap temuan yang mungkin merugikan mereka. Hal ini dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk melakukan rewiu secara efektif. Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi di bidang pengelolaan keuangan dapat menjadi tantangan bagi Inspektorat. Inspektorat perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakpastian dalam regulasi dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat proses rewiu yang efektif (Mahdiannur, 2018).

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data juga menjadi tantangan. Inspektorat perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rewiu (Halik et al., 2023, 2024; Halik & Halik, 2024). Namun, jika sistem yang ada tidak memadai atau tidak terintegrasi, hal ini dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang cepat dan akurat. Laporan keuangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dapat menyulitkan Inspektorat dalam melakukan analisis dan evaluasi.

Kompleksitas ini menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai regulasi dan praktik akuntansi yang berlaku. Berbagai tingkat pemahaman mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan di antara pegawai pemerintah daerah dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan relevan selama proses rewiu. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang pada gilirannya mempengaruhi hasil rewiu.

SIMPULAN

Peran Inspektorat dalam melakukan rewiu pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Melalui penyampaian laporan, diskusi, rekomendasi, dan monitoring tindak lanjut, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Dengan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nabire dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Proses rewiu yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Nabire meliputi serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan hingga monitoring tindak lanjut (Soleh, 2010). Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan proses rewiu yang efektif, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cetakan II). PT Rajagrafindo

Persada.

- Halik, J. B., & Halik, M. Y. (2024). Open Innovation And Digital Marketing : A Catalyst For Culinary SMEs In Makassar. *Jurnal Manajemen*, 28(03), 588–612. <https://doi.org/10.24912/jm.v28i3.2059>
- Halik, J. B., Parawansa, D. A. S., Sudirman, I., & Jusni, J. (2023). Implications of IT Awareness and Digital Marketing to Product Distribution on the Performance of Makassar SMEs. *유통과학연구 Journal of Distribution Science*, 21(7), 105–116. <https://doi.org/10.15722/jds.21.07.202307.105>
- Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtdE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hidayati, Y., & Ali, H. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 250–257. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandil, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lazuardi, A., Gunarianto, G., & Pawestri, H. P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. *Maneksi*, 13(3), 582–595.
- Mahdiannur, M. A. (2018). PERANAN STANDAR MUTU DAN AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM REALITA MASYARAKAT INDONESIA. *Gender and Development*, 120(1), 0–22. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info
- Mahmudi, M. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*. 1605, 1–17. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111467/permendagri-no-107-tahun-2017>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. PP RI No.58. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akreal. (2018). Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akreal. *Permendagri No. 4 Tahun 2018*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121973/permendagri-no-4-tahun-2018>
- Soleh, C. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah : sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Fokus Media.
- Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *E-Journal UNSRAT*, 3(2), 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16872/16395>